



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 39-48
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Rivalitas Politik dan Ideologi antara Dinasti Turki Utsmani dengan Dinasti Safawiyah

Ragil Pangestu^{1*}, Shabrina Fillah², Ronadia³, Hudaidah⁴, Risa Marta Yati⁵

¹⁻⁵ Universitas Sriwijaya, Indonesia

email: varagilpangestu2005@gmail.com

Article Info :

Received:

18-10-2025

Revised:

23-11-2025

Accepted:

18-12-2025

Abstract

This research explores the political and ideological contestation between the Ottoman and Safavid empires during the 16th and 17th centuries, a period marked as one of the most influential rivalries in the history of the Islamic world. The study's significance lies in its ability to reveal how theological distinctions between Sunni and Shia doctrines evolved into a struggle for political legitimacy and geopolitical supremacy across the Middle East. Employing the historical research method combined with a descriptive-analytical approach, this study follows the stages of heuristics, source evaluation, interpretation, and historiography to reconstruct objectively the political interactions of both powers based on primary historical evidence. The result demonstrate that events from the battle of chaldiran 1514 to the Treaty of Zuhab 1639 not only represented an ideological confrontation but also reflected strategic maneuvers to preserve power equilibrium. Ultimately, the Ottoman-Safavid confrontation delineated a political and religious boundary that continued to shape the region into the modern era, while the post-Zuhab reconciliation exemplified how diplomacy and rational negotiation could ease tensions between rival Islamic states.

Keywords: History, Political Rivalry, Ideology, Ottoman Dynasty, Safavid Dynasty.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji rivalitas politik dan ideologis antara Dinasti Utsmani dan Safawiyah abad ke-16 hingga ke-17 yang menjadi salah satu konflik paling berpengaruh dalam sejarah dunia Islam. Kajian ini memiliki arti penting karena menunjukkan bagaimana perbedaan teologis mazhab Sunni dan Syiah berkembang menjadi perebutan legitimasi kekuasaan dan dominasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dalam Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui tahapan, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi untuk merekonstruksi secara objektif dinamika politik kedua kekaisaran berdasarkan sumber primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa perang Chaldiran 1514 dan hingga Perjanjian Zuhab 1639 tidak hanya mencerminkan pertentangan ideologis, tetapi juga merupakan strategi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Sebagai kesimpulan, rivalitas antara Utsmani–Safawiyah membentuk batas politik dan keagamaan yang berpengaruh hingga era modern, sementara tahap rekonsiliasi setelah Perjanjian Zuhab memperlihatkan bahwa konflik antar Dinas Islam dapat direduksi melalui diplomasi dan kompromi rasional..

Kata kunci: Sejarah, Rivalitas Politik, Ideologi, Dinasti Utsmani, Dinasti Safawiyah.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Rivalitas politik dan ideologi antara Dinasti Turki Utsmani dan Dinasti Safawiyah menempati posisi sentral dalam sejarah politik dunia Islam awal modern, karena konflik tersebut merefleksikan pertarungan legitimasi kekuasaan yang berakar pada perbedaan mazhab dan orientasi negara. Kesultanan Utsmani membangun kekuasaannya atas dasar ortodoksi Sunni dan otoritas khalifah, sedangkan Dinasti Safawiyah secara sadar menginstitusionalisasi Syiah Dua Belas Imam sebagai fondasi ideologi negara Persia (Ananda et al., 2024; Supriyadi, 2024). Polarasi ini melampaui ranah teologi dan menjelma sebagai strategi politik untuk mengonsolidasikan loyalitas rakyat dan mengendalikan wilayah perbatasan yang strategis. Dalam konteks tersebut, rivalitas Utsmani Safawiyah menjadi contoh klasik bagaimana agama difungsikan sebagai instrumen negara dalam persaingan geopolitik (Putra, 2024).

Kebangkitan Dinasti Safawiyah di bawah kepemimpinan Shah Ismail I pada awal abad ke-16 menandai perubahan besar dalam konfigurasi kekuasaan Islam di kawasan Iran dan Anatolia Timur. Penetapan Syiah sebagai mazhab resmi negara tidak hanya memperkuat identitas nasional Persia, tetapi

juga menciptakan ketegangan langsung dengan Utsmani yang memandang kebijakan tersebut sebagai ancaman ideologis dan politis (Ananda et al., 2024). Penyebaran pengaruh Safawiyah melalui jaringan Qizilbash memperdalam kekhawatiran Utsmani terhadap potensi disintegrasi internal wilayah perbatasan mereka (Syah et al., 2025). Kondisi ini menjadikan konflik Utsmani–Safawiyah bersifat simultan, baik sebagai konflik antarnegara maupun konflik ideologis lintas komunitas Muslim.

Pertentangan ideologis tersebut kemudian menemukan bentuk paling konkret dalam konfrontasi militer, terutama melalui peristiwa Pertempuran Chaldiran tahun 1514 yang menjadi simbol awal dominasi militer Utsmani atas Safawiyah. Kekalah Safawiyah dalam pertempuran ini menunjukkan kesenjangan teknologi militer, khususnya dalam penggunaan artilleri dan senjata api oleh Utsmani (Putra, 2024). Meski demikian, konflik tidak berhenti pada satu peristiwa, melainkan berkembang menjadi perang berkepanjangan yang melibatkan perebutan wilayah Mesopotamia, Kaukasus, dan Azerbaijan. Rivalitas ini memperlihatkan bahwa ideologi dan militer saling menguatkan dalam strategi ekspansi dan pertahanan kedua dinasti (Munazzalurrohmi & Al Ghatnini, 2025).

Rivalitas tersebut dapat ditelusuri melalui rangkaian perang dan perjanjian politik yang terdokumentasi secara akademik dalam literatur sejarah Islam dan Timur Tengah. Data berikut merangkum konflik utama beserta implikasi teritorialnya yang menegaskan karakter sistematis rivalitas Utsmani–Safawiyah:

Tabel 1. Peristiwa Utama Rivalitas Politik dan Teritorial antara Dinasti Turki Utsmani dan Dinasti Safawiyah (1514–1639)

Peristiwa	Tahun	Dampak Politik
Pertempuran Chaldiran	1514	Dominasi Utsmani di Anatolia Timur
Perang Utsmani–Safawiyah	1532–1555	Perebutan Irak dan Kaukasus
Perjanjian Amasya	1555	Pembagian wilayah Utsmani–Safawi
Perjanjian Zuhab	1639	Penetapan batas geopolitik permanen

Sumber: Ágoston (2005), Savory (1980)

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konflik Utsmani Safawiyah tidak bersifat insidental, melainkan berlangsung dalam kerangka kebijakan negara yang terencana dan berorientasi jangka panjang. Perjanjian Zuhab tahun 1639, misalnya, menjadi titik penting dalam pembentukan batas geopolitik yang masih berpengaruh hingga era modern (Putra, 2024; Zahara et al., 2024). Meski konflik bersenjata mereda, ketegangan ideologis tetap bertahan dalam bentuk rivalitas simbolik dan politik. Hal ini menegaskan bahwa penyelesaian teritorial tidak serta-merta menghapus antagonisme ideologis (Syah et al., 2025).

Dinamika internal masing-masing dinasti turut memengaruhi fluktuasi intensitas konflik yang terjadi, khususnya ketika Dinasti Safawiyah memasuki fase kemunduran politik dan administratif. Lemahnya birokrasi, tekanan ekonomi, serta krisis kepemimpinan mengurangi kemampuan Safawi mempertahankan pengaruh regionalnya (Safitri & Amril, 2025). Di sisi lain Kesultanan Utsmani juga menghadapi tantangan serius berupa stagnasi militer dan tekanan eksternal dari kekuatan Eropa yang mengalihkan fokus geopolitik mereka (Zahara et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa rivalitas ideologis selalu bergantung pada kapasitas struktural negara.

Rivalitas antara Utsmani dan Safawiyah juga membentuk lanskap kultural dan identitas keagamaan yang berbeda secara tajam di dunia Islam. Safawiyah secara sistematis membangun institusi Syiah sebagai identitas nasional Persia, sementara Utsmani meneguhkan ortodoksi Sunni melalui peran ulama negara dan legitimasi khalifah (Lathifah et al., 2021). Proses ini melahirkan polarisasi yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga sosial dan politik. Warisan tersebut terus memengaruhi relasi Sunni–Syiah dalam konteks regional hingga masa kini (Munazzalurrohmi & Al Ghatnini, 2025).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, kajian mengenai rivalitas politik dan ideologi antara Dinasti Turki Utsmani dan Dinasti Safawiyah memiliki signifikansi akademik yang kuat dalam memahami akar konflik intra-Islam. Penelitian ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai relasi antara agama, kekuasaan, dan identitas dalam pembentukan negara Islam awal modern (Putra, 2024). Pemahaman historis yang komprehensif diharapkan mampu memberikan perspektif kritis

terhadap dinamika politik Islam kontemporer. Rivalitas Utsmani–Safawiyah tidak hanya relevan sebagai kajian sejarah, tetapi juga sebagai refleksi berkelanjutan atas konflik ideologis global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian sejarah (historis) yang bertujuan untuk menelusuri, mengumpulkan, memverifikasi, menafsirkan, dan menyajikan kembali peristiwa masa lalu berdasarkan jejak-jejak yang dapat dipercaya. Pendekatan ini digunakan agar hasil penelitian memiliki dasar sumber yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode sejarah berfokus pada upaya memperoleh data yang valid melalui empat tahapan utama, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi keaslian dan kredibilitas data), interpretasi (penafsiran makna sumber), serta historiografi (penulisan hasil rekonstruksi sejarah). Penelitian ini juga memadukan antara metode historis dengan pendekatan deskriptif-analitis guna memperdalam pemahaman terhadap data sejarah yang diperoleh. Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada rekonstruksi peristiwa masa lalu, tetapi juga menekankan analisis kritis terhadap makna dan relevansinya dalam konteks yang lebih luas. Untuk memperkuat kajian, peneliti menggunakan sumber literatur yang beragam dan kredibel, mencakup buku-buku akademik serta referensi daring yang relevan. Melalui kombinasi kedua metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih mendalam, valid, dan memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik Kekuasaan dan Mazhab dalam Hubungan Utsmani–Safawiyah

Berdirinya Dinasti Turki Utsmani berakar pada migrasi bangsa Turki Oghuz yang secara bertahap bergerak dari Asia Tengah menuju Anatolia akibat tekanan politik dan militer, terutama dari invasi Mongol pada abad ke-13. Dalam proses tersebut, kelompok Oghuz di bawah kepemimpinan Ertugrul menjalin hubungan patronase dengan Kesultanan Saljuk Rum dan berperan aktif membantu Sultan Alauddin II dalam konflik melawan Bizantium, yang kemudian membuka jalan bagi penguasaan wilayah perbatasan strategis di Asia Kecil. Wilayah ini menjadi basis awal konsolidasi politik dan militer yang memungkinkan lahirnya kekuasaan Utsmani sebagai entitas mandiri setelah runtuhnya otoritas Saljuk akibat serangan Mongol pada akhir abad ke-13. Momentum ini dimanfaatkan secara optimal oleh Utsman bin Ertugrul untuk mendeklarasikan kedaulatan politik yang menjadi fondasi ekspansi Dinasti Turki Utsmani pada abad-abad berikutnya (Putra, 2024; Rambe et al., 2025).

Di bawah kepemimpinan Utsman dan para penerusnya, Dinasti Turki Utsmani berkembang dari beylik kecil menjadi kekuatan regional yang agresif melalui strategi ekspansi teritorial, integrasi militer, dan legitimasi keagamaan Sunni. Keberhasilan merebut benteng-benteng Bizantium dan penguasaan jalur perdagangan Anatolia memperkuat posisi Utsmani sebagai kekuatan Islam yang semakin dominan di kawasan Mediterania Timur. Struktur militer yang disiplin, terutama pembentukan pasukan Janissari, menjadi keunggulan strategis yang membedakan Utsmani dari kekuatan Islam lain pada masa itu. Dinamika ini memperlihatkan bahwa sejak awal, Utsmani telah memadukan kekuatan politik, militer, dan agama dalam membangun hegemoninya (Zahara et al., 2024; Munazzalurrohmi & Al Ghatnini, 2025).

Berbeda dengan Utsmani, Dinasti Safawiyah berawal dari sebuah tarekat sufi yang berkembang di Ardabil di bawah kepemimpinan Shafi al-Din Ishaq, dengan penekanan pada spiritualitas, loyalitas murid, dan solidaritas kelompok. Selama lebih dari satu abad, tarekat Safawiyah berkembang sebagai gerakan religius yang relatif menjauh dari politik praktis, namun tetap membangun jaringan sosial yang luas di Persia dan Kaukasus. Transformasi ideologis mulai terlihat ketika kepemimpinan tarekat beralih kepada generasi penerus yang semakin terlibat dalam konflik politik regional dan menunjukkan kecenderungan Syiah. Perubahan orientasi ini menjadi titik awal transformasi Safawiyah dari gerakan keagamaan menjadi kekuatan politik yang terorganisasi (Warahmah et al., 2023; Rizqiah et al., 2021).

Pendirian resmi Dinasti Safawiyah pada tahun 1501 di bawah Shah Ismail I menandai babak baru dalam sejarah politik Islam Persia, terutama melalui penetapan Syiah Itsna ‘Asyariah sebagai ideologi negara. Kebijakan ini memperkuat integrasi internal Safawiyah, tetapi sekaligus menciptakan garis pemisah ideologis yang tajam dengan Kekaisaran Utsmani yang bermazhab Sunni. Ekspansi awal Safawiyah yang cepat ke wilayah Azerbaijan, Irak, dan Persia Tengah memperlihatkan ambisi politik Shah Ismail untuk membangun negara Syiah yang kuat dan terpusat. Kondisi ini menjadi latar struktural

munculnya rivalitas terbuka antara dua kekuatan Islam besar tersebut (Ananda et al., 2024; Supriyadi, 2024; Mulyani, 2018):

Tabel 2. Pertempuran dan Perjanjian Utama dalam Rivalitas Dinasti Turki Utsmani dan Safawiyah (1514–1639)

Peristiwa	Tahun	Dampak Strategis
Pertempuran Chaldiran	1514	Kemenangan Utsmani, dominasi Anatolia Timur
Penaklukan Baghdad	1534	Utsmani menguasai pusat politik-religius Irak
Perjanjian Amasya	1555	Pembagian wilayah dan stabilisasi sementara
Perjanjian Zuhab	1639	Menetapan batas permanen Utsmani–Safawi

Sumber: Britannica (2024), Britannica (2024)

Rivalitas antara Dinasti Turki Utsmani dan Safawiyah secara terbuka meletus pada masa pemerintahan Sultan Selim I dan Shah Ismail I, dengan Pertempuran Chaldiran tahun 1514 sebagai simbol konfrontasi ideologi dan teknologi militer. Kekalahan Safawiyah dalam pertempuran tersebut menunjukkan keunggulan sistem militer Utsmani yang telah mengadopsi senjata api dan artileri berat. Meski Utsmani tidak mempertahankan Tabriz dalam jangka panjang, kemenangan ini memperkuat posisi mereka sebagai pelindung Sunni dan penentu keseimbangan kekuatan di kawasan Anatolia dan Persia Barat. Konflik Utsmani–Safawiyah berkembang menjadi persaingan jangka panjang yang melibatkan aspek ideologis, politik, dan teritorial (Putra, 2024; Aji, 2022).

Pada pertengahan abad ke-16, konflik kembali meningkat di bawah kepemimpinan Sultan Süleyman al-Qanuni dan Shah Tahmasp I, dengan fokus perebutan wilayah Irak dan Azerbaijan. Strategi Safawiyah yang menghindari pertempuran terbuka dan menerapkan kebijakan bumi hangus mencerminkan adaptasi terhadap keunggulan militer Utsmani. Konflik berkepanjangan ini akhirnya menghasilkan Perjanjian Amasya tahun 1555 yang menetapkan pembagian wilayah dan menjadi kesepakatan damai formal pertama antara kedua kekaisaran. Namun, perdamaian tersebut lebih bersifat pragmatis daripada ideologis, karena rivalitas tetap berlanjut di tingkat simbolik dan politik (Safitri & Amril, 2025; Supriyadi, 2024).

Ketegangan kembali meningkat setelah wafatnya Shah Tahmasp I, ketika Safawiyah mengalami krisis internal di bawah Shah Mohammad Khodabanda, sementara Utsmani memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan ekspansi ke Kaukasus. Perjanjian Istanbul tahun 1590 mencerminkan posisi lemah Safawiyah yang harus menyerahkan wilayah strategis kepada Utsmani. Kebangkitan Safawiyah baru terjadi pada masa Shah Abbas I, yang melakukan reformasi militer dan administratif secara menyeluruh dengan mengadopsi teknologi senjata api. Keberhasilan merebut kembali wilayah Kaukasus Timur memaksa Utsmani menandatangani Perjanjian Nasuh Pasha tahun 1612 (Rustamzadeh, 2025; Syah et al., 2025).

Rivalitas panjang ini akhirnya mencapai titik stabilisasi melalui Perjanjian Zuhab tahun 1639 setelah pengepungan Baghdad oleh Sultan Murad IV. Perjanjian tersebut menetapkan batas wilayah yang relatif permanen antara dua kekaisaran dan mengakhiri fase konflik militer besar yang berlangsung lebih dari satu abad. Meskipun konflik bersenjata mereda, perbedaan ideologis Sunni–Syiah tetap menjadi warisan historis yang membentuk dinamika politik kawasan hingga masa modern. Pola konflik dan perjanjian yang berulang menunjukkan bahwa rivalitas Utsmani–Safawiyah bukan sekadar pertarungan wilayah, tetapi juga perebutan legitimasi politik dan keagamaan dalam dunia Islam (Sumarno, 2020; Munazzalurrohmi & Al Ghatnini, 2025).

Rivalitas antara Dinasti Turki Utsmani dan Dinasti Safawiyah memperlihatkan bagaimana perbedaan mazhab Sunni dan Syiah dilembagakan secara sistematis dalam struktur negara dan dijadikan basis legitimasi politik. Safawiyah secara aktif melakukan institionalisasi Syiah melalui kebijakan keagamaan, pendidikan, dan simbol-simbol negara, sementara Utsmani mengukuhkan ortodoksi Sunni melalui peran ulama istana dan legitimasi khalifah. Proses ini menciptakan polarisasi yang tidak hanya berdampak pada hubungan antarnegara, tetapi juga memengaruhi konfigurasi sosial masyarakat Muslim di wilayah perbatasan seperti Anatolia Timur, Irak, dan Kaukasus. Rivalitas ideologis ini memperkuat

fragmentasi politik dunia Islam awal modern dan meninggalkan jejak yang masih terasa dalam dinamika Sunni–Syiah kontemporer (Syah et al., 2025; Aji, 2022; Melayu, 2014).

Rivalitas Utsmani–Safawiyah juga memiliki implikasi luas terhadap perkembangan peradaban Islam, khususnya dalam bidang administrasi, militer, pendidikan, dan kebudayaan. Kompetisi antar dua kekaisaran mendorong inovasi institusional, seperti reformasi militer Safawiyah pada masa Shah Abbas I dan konsolidasi birokrasi Utsmani dalam mempertahankan wilayah luasnya. Di sisi lain, konflik berkepanjangan turut menguras sumber daya dan memperlemah stabilitas internal masing-masing dinasti, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemunduran kekuatan politik Islam pada periode berikutnya. Rivalitas Dinasti Turki Utsmani dan Dinasti Safawiyah tidak hanya dapat dipahami sebagai konflik dua kekuatan besar, tetapi juga sebagai proses historis yang membentuk arah perkembangan politik, keagamaan, dan peradaban Islam secara keseluruhan (Safitri & Amril, 2025; Zahara et al., 2024; Usman, 2018; Amin, 2016).

Rekonsiliasi antara Dinasti Turki Utsmani dan Dinasti Safawiyah

Transformasi hubungan antara Dinasti Turki Utsmani dan Dinasti Safawiyah mencapai puncaknya dengan Perjanjian Zuhab pada 17 Mei 1639, yang secara resmi mengakhiri konflik militer panjang antara kedua kekaisaran dan menjadi fondasi normalisasi hubungan bilateral. Perjanjian ini secara tegas menetapkan batas wilayah yang menguntungkan Utsmani di Mesopotamia termasuk Baghdad dan sejumlah wilayah strategis lainnya, sementara Safawiyah mengamankan pengaruhnya di kawasan Kaukasus seperti Yerevan dan bagian timur Armenia, menunjukkan penyelesaian sengketa teritorial yang telah berlangsung lebih dari satu setengah abad. Berkat kesepakatan ini, kedua dinasti mulai memandang satu sama lain bukan sekadar sebagai rival ideologis, tetapi sebagai entitas politik yang sah dengan batas yang diakui secara internasional. Proses rekonsiliasi ini membuka era damai relatif yang lebih stabil hingga beberapa dekade kemudian dan menjadi titik tolak penting dalam sejarah hubungan Timur Tengah awal modern (Putra, 2024; Supriyadi, 2024).

Proses yang lebih formal dalam pergeseran hubungan ini terlihat melalui pertukaran utusan diplomatik antara 1688 dan 1692, ketika Sultan Sulaiman II mengirim Dal Ahmed Agha ke istana Safawi dengan pesan persahabatan kepada Syah Sulaiman I, menandakan niat keras untuk meredam ketegangan lama. Diplomasi ini mencerminkan kecenderungan baru di mana persoalan politik dan ekonomi mulai mendominasi agenda hubungan bilateral, bukan lagi retorika permusuhan agama yang selama ini menguasai narasi konflik.

Istilah-istilah baru seperti *uhuvvet* (persaudaraan), *sulh-i daim* (perdamaian abadi), dan *ittihad* (koalisi) dalam surat-surat resmi memperlihatkan perubahan konseptual pesan diplomatik kedua istana. Transformasi ini merupakan indikator bahwa hubungan Utsmani-Safawiyah telah memasuki fase baru yang lebih kooperatif dan pragmatis (Syah et al., 2025; Syarifah, 2024). Adaptasi hubungan selanjutnya terlihat dalam intensifikasi diplomasi resmi yang dirangkum dalam tabel berikut, yang merinci tahapan penting dalam proses rekonsiliasi serta keluarnya kedua kekaisaran dari pola antagonisme yang panjang:

Tabel 3. Tahapan Rekonsiliasi Diplomatik antara Dinasti Turki Utsmani dan Dinasti Safawiyah (1639–1690-an)

Tahapan Rekonsiliasi	Tahun	Ciri Diplomatik Utama
Perjanjian Zuhab (Qasr-i Shirin)	1639	Penetapan batas wilayah dan stabilisasi hubungan
Utusan Dal Ahmed Agha	1688	Pengakuan persahabatan formal
Pertukaran Utusan Kelb-Ali Ziyâdoglu	1691–1692	Terminologi baru dalam korespondensi
Diplomasi Ekonomi dan Keamanan	1690an	Aturan diplomatik dan perdagangan lintas batas

Sumber: Güngörüler (2024)

Pergeseran orientasi hubungan Utsmani–Safawiyah tidak semata politis, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi, seperti normalisasi jalur perdagangan dari Persia ke Anatolia dan Eropa yang sempat terhambat oleh konflik. Perdagangan sutra dan barang bernilai tinggi kembali mengalir melalui rute lama, sementara izin ziarah ke situs-situs suci Syiah di Mosul dan Karbala dikelola melalui kanal diplomatik resmi yang melibatkan kedua kekaisaran. Konstelasi ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan keamanan perbatasan mendapat prioritas pragmatis di luar narasi sektarian Sunni–Syiah yang dahulu dominan. Ini mencerminkan bahwa faktor material selain ideologis memiliki peran penting dalam pembentukan hubungan transnasional antara kedua kerajaan Islam besar tersebut (Rambe et al., 2025).

Pergeseran ideologis yang lebih halus juga terjadi di kedua kekaisaran; Safawiyah memperkuat struktur internal komunitas Syiah melalui pembentukan hierarki ulama resmi dan dukungan bagi institusi keagamaan di dalam negeri. Sementara itu, Utsmani mulai mengalihkan fokus geopolitiknya ke ancaman Eropa, terutama menjelang Perang Besar Eropa pada akhir abad ke-17, sehingga narasi sektarian tidak lagi menjadi penggerak utama kebijakan luar negeri. Meskipun retorika ketegangan Sunni–Syiah tetap dipakai di ranah domestik untuk legitimasi internal, kebijakan luar negeri kedua negara menunjukkan dinamika yang lebih pragmatis dan berorientasi pada stabilitas regional. Transformasi ini menandai berakhirnya dominasi narasi perang agama dalam relasi politik kedua dinasti (Safitri & Amril, 2025; Syah et al., 2025; Sumarno, 2020).

Pendekatan diplomatik yang lebih teratur pasca-1639 juga menandai pembentukan sistem protokol utusan dan pertukaran duta tetap, yang menjadi fondasi hubungan antarnegara yang lebih modern dalam konteks Timur Tengah awal modern. Protokol ini mencakup aturan-aturan formal untuk pertukaran surat, pengakuan status diplomat, serta mekanisme keamanan perbatasan yang sebelumnya tidak ada selama fase konflik panjang. Implementasi sistem diplomatik tersebut membantu mengurangi konflik internal yang bersifat spillover dan memberikan kerangka penanganan sengketa tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Perubahan ini selaras dengan tren global pada periode yang sama, di mana sistem diplomasi semakin terinstitusi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antarnegara (Putra, 2024).

Hubungan yang lebih stabil turut memberi ruang bagi pertukaran budaya dan intelektual selama periode damai berikutnya, meskipun intensitasnya berkembang secara bertahap. Aktivitas budaya seperti pertukaran ulama, pedagang, serta seni rupa dan sastra mengalami peningkatan, yang memperkaya kehidupan intelektual di kedua kerajaan. Hal ini dapat dilihat sebagai bukti bahwa rekonsiliasi politik tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada pertukaran sosial-budaya yang memperkuat jalinan antar komunitas Muslim di wilayah perbatasan. Pertumbuhan wilayah aman ini mendukung interaksi manusia lintas batas yang memberikan kontribusi terhadap integrasi kultural regional (Lathifah et al., 2021).

Rekonsiliasi antara Dinasti Turki Utsmani dan Dinasti Safawiyah memperlihatkan dinamika hubungan internasional yang bertransformasi dari dominasi konflik ideologis menuju pragmatisme politik dan diplomasi. Perubahan ini dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti ancaman dari kekuatan Eropa, serta kebutuhan ekonomi dan stabilitas internal masing-masing kekaisaran. Transisi dari permusuhan sektarian ke kerja sama regional menjadi salah satu contoh penting bagaimana negara-negara Islam pada masa awal modern mengelola hubungan bilateral secara lebih terstruktur dan rasional. Proses rekonsiliasi ini bukan hanya fenomena lokal, tetapi bagian dari evolusi luas hubungan internasional dalam sejarah dunia Islam (Rambe et al., 2025; Munazzalurrohm & Al Ghatnini, 2025; Aji, 2022).

Rekonsiliasi antara Dinasti Turki Utsmani dan Dinasti Safawiyah juga memperlihatkan perubahan cara kedua kekaisaran membangun legitimasi politik di hadapan dunia Islam. Jika sebelumnya klaim keagamaan digunakan sebagai dasar pemberian legitimasi politik, pada periode pasca-Zuhab legitimasi kekuasaan lebih banyak ditopang oleh stabilitas internal dan pengakuan politik eksternal. Utsmani memanfaatkan statusnya sebagai pelindung wilayah suci dan kekhilafahan, sementara Safawiyah menegaskan identitas nasional Persia melalui konsolidasi Syiah sebagai mazhab negara tanpa menjadikannya instrumen konfrontasi terbuka. Pola ini menunjukkan bahwa ideologi keagamaan tetap penting, tetapi ditempatkan dalam kerangka kepentingan negara yang lebih luas dan realistik (Supriyadi, 2024; Syarifah, 2024; Melayu, 2014).

Berakhirnya rivalitas terbuka antara Utsmani dan Safawiyah turut berkontribusi terhadap stabilisasi kawasan Timur Tengah dan Asia Barat pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Stabilitas

ini memberi ruang bagi berkembangnya administrasi pemerintahan, pendidikan keagamaan, dan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan yang sebelumnya menjadi medan perang berkepanjangan. Hubungan yang lebih tenang juga mengurangi eskalasi konflik sektarian lintas wilayah, meskipun ketegangan Sunni–Syiah tidak sepenuhnya hilang dari wacana sosial dan politik. Rekonsiliasi dapat dipahami sebagai faktor pendukung bagi keberlangsungan peradaban Islam di tengah tekanan eksternal dari ekspansi kekuatan Eropa (Farouqy, 2021).

Pada akhirnya, pengalaman rekonsiliasi Utsmani–Safawiyah memperlihatkan bahwa konflik ideologis yang berlangsung lama tidak selalu berakhir melalui dominasi salah satu pihak, tetapi dapat diselesaikan melalui kompromi politik yang rasional. Kesediaan kedua dinasti untuk mengakui kedaulatan satu sama lain menandai kedewasaan politik yang jarang ditemukan pada fase awal konflik mereka. Dinamika ini sekaligus menegaskan bahwa hubungan internasional dalam dunia Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan konteks geopolitik. Rivalitas dan rekonsiliasi Utsmani–Safawiyah layak dipahami sebagai satu kesatuan proses historis yang membentuk arah politik, ideologi, dan peradaban Islam pada era modern awal (Putra, 2024).

Implikasi Rivalitas terhadap Dunia Islam dan Politik Regional

Rivalitas antara Dinasti Turki Utsmani dan Dinasti Safawiyah sejak awal abad ke-16 merupakan konflik multidimensional yang tidak hanya berkuat pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada perebutan legitimasi keagamaan dalam dunia Islam. Utsmani membangun otoritasnya melalui penegasan mazhab Sunni dan klaim kekhilafahan universal, sementara Safawiyah menginstitusionalisasi Syi'isme sebagai ideologi negara yang melekat pada identitas Persia. Polarasi ini menciptakan batas ideologis yang tajam dan menghambat terbentuknya solidaritas politik lintas wilayah Muslim. Kondisi tersebut memperkuat fragmentasi internal umat Islam dan memengaruhi konfigurasi politik regional secara luas (Putra, 2024; Aji, 2022; Ananda et al., 2024).

Implikasi langsung dari rivalitas ideologis ini terlihat pada meningkatnya konflik bersenjata di wilayah perbatasan seperti Anatolia timur, Kaukasus, dan Mesopotamia yang menjadi arena perebutan pengaruh kedua kekaisaran. Pertarungan ini tidak hanya memicu instabilitas politik, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat lokal yang terjebak dalam politik identitas sektarian. Dalam jangka panjang, konflik Utsmani–Safawi berkontribusi pada terbentuknya batas-batas geopolitik yang masih dapat ditelusuri hingga era modern. Dinamika tersebut menegaskan bahwa konflik intra-Islam memiliki konsekuensi struktural yang melampaui konteks zamannya (Syah et al., 2025; Munazzalurrohm & Al Ghatnini, 2025).

Upaya untuk mengelola konflik mulai tampak melalui diplomasi damai yang menandai kesadaran kedua pihak akan biaya politik dan militer yang terus meningkat. Perjanjian Amasya pada 1555 menjadi tonggak awal kompromi, di mana wilayah Armenia, Georgia, dan Irak dibagi untuk meredam eskalasi konflik terbuka. Meskipun bersifat sementara, perjanjian ini memperlihatkan pergeseran dari pendekatan konfrontatif menuju negosiasi berbasis kepentingan. Langkah ini membuka ruang bagi stabilitas relatif, meskipun ketegangan ideologis tetap bertahan di bawah permukaan (Mulyani, 2018; Lathifah et al., 2021; Supriyadi, 2024).

Puncak pengaturan geopolitik dicapai melalui Perjanjian Zuhab pada 1639 yang secara tegas menetapkan garis batas antara wilayah Utsmani dan Safawi. Kesepakatan ini mengakhiri perang berkepanjangan dan memberikan kerangka hukum bagi stabilitas regional di Mesopotamia dan Kaukasus. Dengan adanya pengakuan teritorial yang jelas kedua kekaisaran memperoleh kepastian politik yang memungkinkan pengalihan fokus pada konsolidasi internal. Perjanjian ini sering dipandang sebagai dasar hubungan bilateral yang relatif stabil hingga abad berikutnya (Putra, 2024; Safitri & Amril, 2025). Sebagai penguatan kronologi dan implikasi geopolitik tersebut, berikut disajikan data perjanjian penting yang membentuk hubungan Utsmani–Safawi:

Tabel 4. Perjanjian Damai dan Normalisasi Hubungan antara Dinasti Turki Utsmani dan Dinasti Safawiyah

Perjanjian	Tahun	Dampak Utama
Perdamaian Amasya	1555	Pengakuan awal wilayah dan pengurangan konflik terbuka

Perjanjian Zuhab (Qasr-i Shirin) Normalisasi Diplomatik	1639 Abad ke-17 akhir	Penetapan batas permanen Utsmani–Safawi Stabilitas perbatasan dan diplomasi reguler
--	-----------------------------	--

Sumber: Britannica (2025), Baritannica.com (2025)

Pasca perjanjian tersebut, hubungan Utsmani dan Safawi memasuki fase rekonsiliasi diplomatik yang lebih teratur dengan pertukaran utusan resmi dan penetapan protokol diplomasi. Meskipun kecurigaan ideologis masih ada, kedua pihak mulai menempatkan stabilitas politik dan keamanan perbatasan sebagai prioritas. Jalur perdagangan kembali dibuka dan aktivitas ekonomi lintas wilayah mengalami pemulihan bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan pragmatis mampu menggeser dominasi retorika sektarian dalam praktik hubungan antarnegara (Rambe et al., 2025; Zahara et al., 2024).

Dalam kebijakan keagamaan, kedua kekaisaran juga melakukan penyesuaian strategis untuk menjaga stabilitas internal dan eksternal. Dokumen administratif Utsmani menunjukkan pengawasan ketat terhadap kelompok Qizilbash, namun dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu konflik terbuka dengan Safawi. Di pihak lain Safawiyah mulai meredam kecaman ekstrem terhadap Sunni guna mempertahankan perdamaian regional. Pendekatan ini memperlihatkan moderasi kebijakan tanpa menghapus batas identitas ideologis yang telah terbentuk (Syah et al., 2025).

Implikasi lebih luas dari rekonsiliasi ini terlihat pada stabilisasi politik dunia Islam bagian barat dan Persia, yang memungkinkan berkembangnya administrasi, pendidikan, dan kehidupan intelektual. Wilayah perbatasan yang sebelumnya rawan konflik berubah menjadi ruang interaksi sosial dan ekonomi yang lebih terkendali. Stabilitas ini turut mengurangi potensi konflik sektarian lintas wilayah, meskipun wacana Sunni–Syiah tetap hadir dalam diskursus keagamaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan konflik ideologis dapat berdampak positif pada keberlangsungan peradaban Islam (Al Farouqy, 2021).

Rivalitas dan rekonsiliasi Utsmani–Safawi membentuk pola hubungan antarnegara Muslim yang berbasis keseimbangan kekuasaan. Model ini memperlihatkan bahwa konflik intra-Islam tidak selalu berujung pada kehancuran, tetapi dapat diarahkan menuju kompromi institusional. Pengalaman ini menjadi referensi penting dalam memahami dinamika politik modern di kawasan Timur Tengah. Ingatan sejarah Utsmani–Safawi masih memengaruhi relasi Iran dengan Turki dan negara-negara Arab hingga saat ini (Sumarno, 2020; Amin, 2016). Implikasi rivalitas Utsmani dan Safawi terhadap dunia Islam dan politik regional menunjukkan kompleksitas hubungan antara ideologi, kekuasaan, dan diplomasi. Konflik sektarian yang semula bersifat destruktif akhirnya dikelola melalui mekanisme politik yang lebih rasional. Transformasi ini menegaskan bahwa sejarah dunia Islam tidak hanya dipenuhi konflik, tetapi juga upaya rekonsiliasi yang berorientasi pada stabilitas dan keberlanjutan. Rivalitas Utsmani–Safawi layak dipahami sebagai proses historis yang membentuk arah politik dan peradaban Islam lintas zaman (Putra, 2024).

Dampak lain dari rivalitas Utsmani–Safawi terlihat pada terbentuknya tradisi politik berbasis kewaspadaan ideologis yang diwariskan lintas generasi di kedua kekaisaran. Elite politik dan keagamaan memanfaatkan memori konflik untuk memperkuat loyalitas internal dan mengonsolidasikan kekuasaan pusat. Narasi sejarah resmi di masing-masing wilayah cenderung menampilkan pihak lawan sebagai ancaman laten, meskipun secara faktual hubungan diplomatik telah stabil. Pola ini memperlihatkan bagaimana sejarah konflik digunakan sebagai instrumen legitimasi politik jangka panjang (Melayu, 2014). Rivalitas tersebut turut membentuk dinamika interaksi antarmazhab di wilayah perbatasan dan kota-kota kosmopolitan seperti Baghdad dan Tabriz. Meskipun terjadi segregasi simbolik antara komunitas Sunni dan Syiah, praktik kehidupan sehari-hari sering kali menunjukkan bentuk koeksistensi pragmatis. Negara memainkan peran penting dalam mengatur batas toleransi ini melalui kebijakan hukum dan administratif yang bersifat selektif. Fenomena tersebut menegaskan bahwa relasi sektarian tidak selalu bersifat konfrontatif, melainkan dinegosiasikan secara kontekstual (Lathifah et al., 2021).

Pada akhirnya, rivalitas dan rekonsiliasi antara Dinasti Turki Utsmani dan Dinasti Safawiyah memberikan pelajaran historis mengenai pengelolaan konflik ideologis dalam dunia Islam. Konflik yang berlarut-larut terbukti melemahkan stabilitas kawasan, sementara kompromi politik mampu menciptakan keseimbangan yang lebih berkelanjutan. Pengalaman historis ini relevan untuk membaca

dinamika politik kontemporer di Timur Tengah yang masih diwarnai ketegangan identitas dan kepentingan geopolitik. Dengan memahami pola hubungan Utsmani–Safawi, diskursus mengenai konflik intra-Islam dapat diarahkan pada pendekatan yang lebih historis, kritis, dan konstruktif (Putra, 2024).

KESIMPULAN

Rivalitas antara Dinasti Utsmani dan Safawiyah pada abad ke-16 hingga ke-17 tidak hanya dipicu oleh perbedaan teologis antara mazhab Sunni dan Syiah, tetapi juga oleh perebutan legitimasi politik serta dominasi kekuasaan di kawasan Timur Tengah. Persaingan ini menciptakan garis pemisah ideologis yang tajam dalam dunia Islam dan memengaruhi dinamika geopolitik regional. Pertempuran-pertempuran besar, seperti Chaldiran tahun 1514 hingga Baghdad tahun 1638, memperlihatkan upaya kedua kekaisaran dalam menegaskan pengaruhnya, dengan agama kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik dan sosial. Melalui perjanjian-perjanjian penting seperti Amasya tahun 1555 dan Zuhab tahun 1639, kedua dinasti akhirnya menemukan titik temu yang menandai pergeseran dari rivalitas teologis menuju hubungan diplomatik yang lebih pragmatis. Kesepakatan ini membuka jalan bagi stabilitas perbatasan, kerja sama ekonomi, dan pertukaran diplomatik yang teratur. Proses rekonsiliasi ini menunjukkan bahwa konflik intra-Islam bisa dikelola melalui dialog dan kompromi, serta menyuguhkan pelajaran berharga bagi dunia Islam modern tentang perlunya menyeimbangkan kepentingan politik dengan solidaritas keagamaan untuk menjaga stabilitas regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ágoston, G. (2005). *Guns for the Sultan: military power and the weapons industry in the Ottoman Empire*. Cambridge University Press.
- Aji, A. C. (2022). Islam dalam Pusaran Konflik: Syiah dan Sunni Era Dinasti Safawi. *Journal of Integrative International Relations*, 7(1), 43-64. <https://doi.org/10.15642/jiir.2022.7.1.43-64>.
- Al Farouqy, A. M. (2021). Peradaban Islam Pada Masa Dinasti-Dinasti Kecil Di Timur Baghdad. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 9(1), 41-57. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v9i1.18664>.
- Amin, M. (2016). Kemunduran dan Kehancuran Dinasti Abbasiyah Serta Dampaknya Terhadap Dunia Islam Kontemporer. *El-Hekam*, 1(1), 87-106. <https://doi.org/10.31958/jeh.v1i1.340>.
- Ananda, R. H., Jambak, M. R., & Kholil, A. (2024). Shah Ismail I: Pelopor Penyebaran Teologi Syi'ah di Iran (Kajian Historis). *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 8(2), 583-594. <https://doi.org/10.30743/mkd.v8i2.9515>.
- Baritannica.com (2025). “Treaty of Qaṣr-i Shīrīn: Iraq, 1639”, tersedia di <https://www.britannica.com/topic/Treaty-of-Qasr-i-Shirin>, diakses pada 19 Desember 2025.
- Basri, M., Fadillah, A. P., Juwita, F. S., & Zannah, M. (2024). Serangan Timur Lenk Pada Masa Sejarah Kemunduran Peradaban Islam. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 2(1), 26-32. <https://doi.org/10.51903/pendekar.v2i1.559>.
- Britannica. (2024). “Battle of Chāldirān: Turkey”, tersedia di <https://www.britannica.com/event/Battle-of-Chaldiran>, diakses pada 19 Desember 2025.
- Britannica. (2025). “Peace of Amasya: Ottoman Empire [1555]”, tersedia di <https://www.britannica.com/topic/Peace-of-Amasya>, diakses pada 19 Desember 2025.
- Güngörler, S. (2024). *The Ottoman Empire and Safavid Iran, 1639–1683: Diplomacy and Borderlands in the Early Modern Middle East*. Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781399510103.001.0001>.
- Lathifah, I., Daulay, H. P., & Dahlan, Z. (2021). Peradaban dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Safawi di Persia. *Islamic Education*, 1(2), 54-61. <https://doi.org/10.57251/ie.v1i2.51>.
- Melayu, H. A. (2014). Syariat Islam Pada Dinasti di Asia Telaah Kritis Tipologi Mujtahid dan Genealogi Intelektual. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 3(1), 436-457. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v3i1.338>.
- Mulyani, S. (2018). Sejarah dan Peradaban Islam Dinasti Safawi di Persia. *Al-Manba Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 7(13), 92-101. <https://doi.org/10.69782/almanba.v7i13.8>.
- Munazzalurrohmi, M., & Al Ghatnini, R. A. S. (2025). Islam pada Masa Tiga Kerajaan Besar. *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, 2(2), 130-144. <https://doi.org/10.38073/pelita.v2i2.2580>.

- Putra, M. H. A. (2024). Konflik Dinasti Turki Utsmani-Shafawiyah-Mamluk. *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 8(1 Februari), 1-9. <https://doi.org/10.63915/fihros.v8i1%20Februari.75>.
- Rambe, R., Fitriyani, F., Hidayat, R., & Setyaningsih, R. (2025). Sejarah Perkembangan Islam pada Masa Turki Utsmani, Safawi, dan Mongol: Studi Komparatif Dinamika Politik, Keagamaan, dan Peradaban: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4622-4627. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1006>.
- Rizqiah, F., Liadi, F., & Husni, M. (2021). Transformasi Gerakan Sosial Dinasti Syafawiyah di Persia, 1301-1629. *Syams: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(2), 68-84. <https://doi.org/10.23971/js.v2i2.3875>.
- Safitri, N., & Amril, M. (2025). Kemajuan Dan Kemunduran Dinasti Safawi Di Persia. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 20(2), 2119-2126. <https://doi.org/10.55558/al-ihda.v20i2.293>.
- Savory, R. (1980). *Iran under the Safavids* (p. 42). Cambridge University Press.
- Sumarno, W. F. (2020). Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979. *SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2), 145-158. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1931>.
- Supriyadi, A. (2024). Daulah Safawi (1588-1629): Dinamika Politik, Kulturalisme, dan Identitas Nasional. *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 5(1), 41-50. <https://doi.org/10.24042/00202452194300>.
- Syah, M. K. T., Sa'adah, P. L., & Nurcahyah, Y. N. (2025). Dinamika Dinamika konflik dan Sunni Syiah pada Era Dinasti Safawiyah: Dinamika konflik dan Sunni Syiah pada Era Dinasti Safawiyah. *JUSAN: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, 3(1), 42-52.
- Syarifah, H. I. (2024). Evolusi Sistem Pemerintahan Islam: Studi Kasus Kesultanan Syafawi di Persia. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 116-138. <https://doi.org/10.18860/mjpaiv3i3.10819>.
- Usman, I. K. (2018). Pendidikan pada Tiga Kerajaan Besar (Kerajaan Turki Usmani, Safawiy di Persia dan Moghul di India). *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 11(1). <https://dx.doi.org/10.30984/jii.v11i1.577>.
- Warahmah, M., Yasnel, Y., & Bisri, B. Tarekat Shafawiyah dalam Membangun Kerajaan Shafawi di Persia. *Journal of Education and Teaching*, 5(2), 56-70. <http://dx.doi.org/10.24014/jete.v5i2.24058>.
- Zahara, F. N., Fatia, A., & Hakim, L. (2024). Faktor Internal Dan Eksternal Di Balik Keruntuhan Kekhalifahan Utsmani. *Jurnal Tips Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 101-109.